BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan di dunia (Nawir, Syamsuddin, & Jusniaty, 2022). Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketika individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti sandang, pangan, dan papan (Takaredas, Baruwadi, & Akib, 2024). Kemiskinan menjadi masalah karena dampaknya yang luas dan serius terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*, upaya penurunan tingkat kemiskinan menjadi prioritas utama karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang memerlukan penanganan secara menyeluruh dan terintegrasi (Sangadah, Laut, & Jalunggono, 2020).

Sinurat (2023) menyatakan bahwa berbagai aspek seperti pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses terhadap layanan, kondisi geografis, dan lingkungan saling berkaitan dan berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Individu dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung tidak memiliki keterampilan atau kompetensi yang memadai, sehingga menghadapi kesulitan dalam bersaing di pasar tenaga kerja. Akibatnya, pendapatan individu sangat bergantung pada jenis pekerjaan yang dapat diakses, yang umumnya memiliki upah rendah dan kualitas yang kurang layak. Rendahnya tingkat pendidikan ini dapat memperkuat siklus kemiskinan, karena terbatasnya akses terhadap pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang memadai menghambat upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

Tingkat kemiskinan diukur melalui jumlah masyarakat miskin, yaitu masyarakat yang pengeluarannya berada di bawah batas tertentu yang dikenal sebagai garis kemiskinan (Lestari, Robiani, & Sukanto, 2023). Garis kemiskinan

sendiri didefinisikan sebagai jumlah minimum pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup (Yamani, 2020). Garis kemiskinan internasional untuk kategori kemiskinan ekstrem ditetapkan sebesar \$2,15 per kapita per hari, dengan penyesuaian berdasarkan harga tahun 2017 (World Bank Group, 2024). Berdasarkan data World Bank pada tahun 2024, tercatat sebanyak 692 juta orang di seluruh dunia masih hidup dengan pendapatan harian di bawah \$2,15, yang menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem masih menjadi tantangan global yang membutuhkan perhatian serius (World Bank, 2025).

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Astuti, 2024). Pemerintah Indonesia telah merancang dan menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan yang seharusnya mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan (Aulia & Saputra, 2021). Pada September 2024, garis kemiskinan di Indonesia ditetapkan sebesar Rp595.242,00 per kapita per bulan, dengan jumlah masyarakat miskin mencapai 24,06 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2025). Selain diukur berdasarkan garis kemiskinan, kondisi kemiskinan di Indonesia juga dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).

Menurut Badan Pusat Statistik (2025), persentase masyarakat miskin tertinggi berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 18,62 persen. Sebaliknya, Pulau Kalimantan memiliki persentase masyarakat miskin terendah, yaitu sebesar 5,30 persen. Namun, dari segi jumlah, sebagian besar masyarakat miskin berada di Pulau Jawa dengan total mencapai 12,62 juta orang, sedangkan jumlah masyarakat miskin paling sedikit terdapat di Pulau Kalimantan, yaitu sebanyak 0,91 juta orang.

Masyarakat miskin dapat dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan daerah tempat tinggal, yaitu masyarakat miskin perkotaan dan masyarakat miskin perdesaan (Badan Pusat Statistik, 2025). Masyarakat miskin perkotaan merupakan kelompok penduduk yang tinggal di wilayah kota atau perkotaan dan memiliki tingkat pengeluaran di bawah garis kemiskinan, sedangkan masyarakat miskin perdesaan adalah kelompok penduduk yang tinggal di wilayah desa atau perdesaan

dan berada di bawah garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2024). Menurut Badan Pusat Statistik (2010), perkotaan adalah status suatu wilayah administrasi setingkat desa atau kelurahan yang memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan, sementara perdesaan adalah status suatu wilayah administrasi setingkat desa atau kelurahan yang belum memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan.

Menurut Badan Pusat Statistik (2025), pada September 2024, persentase masyarakat miskin perkotaan tercatat sebesar 6,66 persen, sedangkan persentase masyarakat miskin perdesaan mencapai 11,34 persen. Dari segi jumlah, masyarakat miskin perkotaan berjumlah 11,05 juta orang, sementara masyarakat miskin perdesaan mencapai 13,01 juta orang. Data ini menunjukkan bahwa jumlah dan persentase masyarakat miskin masih lebih tinggi di perdesaan dibandingkan dengan di perkotaan.

Kendati demikian, menurut Hadijah dan Sadali (2020), jumlah masyarakat miskin perkotaan dapat meningkat akibat peningkatan urbanisasi penduduk miskin dari desa berpindah ke kota, dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Tren urbanisasi di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dengan proporsi penduduk perkotaan diproyeksikan naik dari 56,7 persen pada tahun 2020 menjadi 60 persen pada tahun 2025 (Indahri dalam Pida, Aini, & Putri, 2025). Urbanisasi yang berlangsung secara cepat dan tidak terkendali menyebabkan kota-kota besar menjadi wilayah di mana ketimpangan sosial dan ekonomi semakin terlihat jelas (Watif, Ramadhani, Juamiati, Tahir, & Hikmah, 2024). Di satu sisi, sebagian masyarakat menikmati kemakmuran dan kehidupan yang layak, tetapi di sisi lain, tidak sedikit yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan hidup dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Selain itu, laju urbanisasi yang pesat juga menghasilkan kondisi lingkungan yang penuh tekanan dan stres bagi individu yang menetap di kawasan perkotaan (Mutiara, 2024).

Oktava (2017) mengatakan bahwa urbanisasi banyak dilakukan oleh penduduk miskin di desa, dengan tujuan utama ke kota-kota besar, terutama Kota Jakarta yang menjadi tujuan terbanyak. Jakarta memiliki daya tarik kuat bagi para pelaku urbanisasi karena dianggap sebagai kota dengan fasilitas yang lengkap dan kemajuan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Umumnya, pelaku urbanisasi berasal dari kelompok usia produktif, yaitu penduduk berusia 15

hingga 64 tahun yang masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu (Harahap, Salmah, & Mahyuni, 2024; Noveria, 2010; Purba, Tampubolon, Gaol, Siregar, & Hidayat, 2024). Setelah menetap di kota besar, sebagian besar pelaku urbanisasi bekerja di sektor informal atau biasa disebut sebagai pekerja informal (Oktava, 2017). Pekerja informal adalah individu yang bekerja di sektor ekonomi tanpa terikat pada kontrak kerja formal atau tanpa tercakup dalam sistem perlindungan ketenagakerjaan yang resmi (Panjaitan & Ritonga, 2024). Sektor ekonomi informal ini memiliki peran yang cukup penting dalam menopang kehidupan masyarakat miskin perkotaan, terutama bagi yang memiliki keterbatasan modal dan keterampilan (Nisa' & Mustaqim, 2018).

Kehidupan masyarakat miskin perkotaan cenderung lebih kompleks dibandingkan dengan masyarakat miskin perdesaan. Hal ini berkaitan dengan masalah keuangan yang menjadi sumber daya utama untuk memenuhi kebutuhan hidup di perkotaan (Lasaiba & Lasaiba, 2022). Ketergantungan terhadap uang sebagai sumber daya utama untuk bertahan hidup di kota menyebabkan masyarakat miskin perkotaan menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan dasar. Di perdesaan, meskipun berpenghasilan rendah, penduduk masih dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan melalui hasil pertanian yang dikelola sendiri (Lasaiba dalam Lasaiba & Lasaiba, 2022). Selain itu, kesibukan dan tingginya tuntutan kebutuhan hidup di perkotaan memunculkan sifat individualitas yang lebih tinggi, sementara kehidupan sosial di perdesaan cenderung masih lebih erat dan saling mendukung (Wahab & Sudirman, 2023). Akibatnya, masyarakat miskin perkotaan ketika menghadapi kesulitan minim dukungan sosial, sehingga lebih rentan terpuruk dibandingkan warga desa yang masih dapat mengandalkan dukungan dari masyarakat di sekitarnya.

Kompleksitas kehidupan di wilayah perkotaan menyebabkan masyarakat miskin perkotaan menghadapi tekanan yang lebih besar dibandingkan dengan yang tinggal di perdesaan. Noviawati dan Narendri (2017) menyatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat depresi antara masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan, di mana individu yang hidup dalam kemiskinan di wilayah perkotaan mengalami tingkat depresi yang lebih tinggi. Selain itu, masyarakat miskin di daerah perkotaan juga memiliki tingkat kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) yang lebih

rendah dibandingkan dengan masyarakat miskin di perdesaan.

Haushofer dan Fehr (2014) mengungkapkan bahwa kemiskinan berkaitan dengan ketidakbahagiaan, depresi, kecemasan, serta kadar hormon kortisol dalam tubuh, yang dapat memicu stres dan afek negatif. Kondisi ini cenderung mendorong individu untuk mengambil keputusan yang kurang optimal dan menghindari risiko. Akibatnya, individu yang hidup dalam kemiskinan sering kali terjebak dalam perilaku ekonomi yang merugikan, seperti mengambil utang secara berlebihan bahkan dengan suku bunga tinggi dan memilih pekerjaan berisiko rendah dengan penghasilan yang kecil (de Bruijn & Antonides, 2022; Rahayu, Mulyanto, Johadi, & Purnama, 2023). Perilaku semacam ini justru dapat memperkuat siklus kemiskinan, karena keputusan-keputusan yang diambil cenderung menghambat peluang untuk keluar dari kondisi tersebut.

Yang (2016) menjelaskan bahwa kemiskinan berpengaruh terhadap tingkat diskonto waktu yang tinggi. Diskonto waktu atau yang juga dikenal sebagai diskonto penundaan, merupakan kecenderungan individu untuk menilai lebih rendah suatu hasil, baik yang bersifat positif maupun negatif, ketika terdapat penundaan dalam penerimaannya (Hesketh dalam Saunders & Fogarty, 2001). Artinya, semakin lama waktu tunggu untuk menerima suatu hasil, maka semakin kecil nilai subjektif yang diberikan individu terhadap hasil tersebut.

Masyarakat miskin dengan tingkat diskonto waktu yang tinggi cenderung memilih imbalan yang lebih kecil dan segera, dibandingkan dengan imbalan yang lebih besar tetapi tertunda (Yang, 2016). Misalnya, individu miskin lebih memilih menerima Rp500.000,00 hari ini daripada Rp1.000.000,00 dalam enam bulan, meskipun nilai nominal yang ditunda lebih besar. Hal ini terjadi karena lemahnya kemampuan kontrol diri dan perilaku impulsif (Liu dkk. dalam Adamkovič & Martončík, 2017). Menurut Haushofer dan Fehr (2014), preferensi terhadap imbalan kecil yang segera ini menunjukkan orientasi yang kuat pada kepuasan yang bersifat segera, sehingga individu dengan tingkat diskonto waktu yang tinggi menjadi kurang berminat untuk berinvestasi dalam hal-hal yang membutuhkan waktu lama untuk memberikan hasil, seperti pendidikan dan kesehatan. Akibatnya, perilaku ini dapat menghambat peningkatan pendapatan di masa depan dan memperkuat siklus kemiskinan. Selain itu, menurut Anderson, Dietz, Gordon, dan

Klawitter (2004), tingkat diskonto waktu yang tinggi juga dapat berdampak pada kebiasaan menabung, pengambilan utang, dan berolahraga.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa diskonto waktu memiliki hubungan yang erat dengan refleksi kognitif. Refleksi kognitif adalah kecenderungan atau kemampuan individu untuk tidak langsung memberikan jawaban spontan yang pertama kali terlintas (Frederick, 2005). Jawaban spontan yang pertama kali terlintas sering kali salah, dan refleksi kognitif dapat menghasilkan jawaban yang lebih reflektif dan benar (Otero, Salgado, & Moscoso, 2021).

Refleksi kognitif merupakan konsep yang berlandaskan pada pandangan bahwa pikiran manusia bekerja melalui dua jenis proses kognitif, yaitu sistem 1 (intuitif) dan sistem 2 (reflektif) (Kahneman & Frederick, 2002; Otero *et al.*, 2021). Menurut Kahneman (2003), operasi dari sistem 1 biasanya berlangsung cepat, otomatis, tanpa memerlukan usaha, tidak dapat diintrospeksi, sering kali dipengaruhi oleh emosi, dan dipengaruhi oleh kebiasaan sehingga sulit untuk dikendalikan atau diubah. Sementara itu, operasi dari sistem 2 berlangsung lebih lambat, memerlukan usaha, lebih mungkin untuk dipantau secara sadar dan dikendalikan secara sengaja, dan relatif fleksibel dan berpotensi mengikuti aturan tertentu.

Menurut Białek, Bergelt, Majima, dan Koehler (2019), refleksi kognitif dapat memprediksi kecenderungan individu dalam melakukan diskonto penundaan. Menurut Białek dan Sawicki (2018), individu dengan tingkat refleksi kognitif yang tinggi memiliki tingkat diskonto penundaan yang lebih rendah dan menunjukkan tingkat impulsivitas yang lebih rendah. Individu dengan tingkat refleksi kognitif yang tinggi cenderung lebih mampu menahan godaan untuk memilih imbalan yang lebih kecil namun segera, dan lebih memilih imbalan yang lebih besar meskipun harus menunggu lebih lama. Sebaliknya, individu dengan refleksi kognitif rendah lebih mudah terpengaruh oleh dorongan sesaat dan lebih cenderung mengambil keputusan yang memberikan kepuasan instan.

Berdasarkan penelitian terdahulu diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan refleksi kognitif terhadap diskonto waktu. Namun, hingga kini belum ditemukan penelitian yang secara khusus meneliti pengaruh refleksi kognitif terhadap diskonto waktu dalam konteks masyarakat miskin perkotaan di Jakarta.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan populasi. Berdasarkan hal tersebut, maka diusunglah tujuan dari penelitian ini, yakni untuk mengetahui pengaruh refleksi kognitif terhadap diskonto waktu pada populasi masyarakat miskin perkotaan di Jakarta yang direpresentasikan oleh pekerja informal dengan penghasilan di bawah UMP. Kemiskinan di wilayah perkotaan merupakan permasalahan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, namun penelitian mengenai kemiskinan di Indonesia selama ini masih lebih banyak fokus pada sudut pandang ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk memperkaya dan memberikan sudut pandang baru terkait isu kemiskinan melalui pendekatan psikologi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Kemiskinan masih menjadi permasalahan serius yang belum terselesaikan, termasuk di Indonesia.
- b. Masyarakat miskin perkotaan menghadapi kehidupan yang lebih kompleks, sehingga memiliki tingkat depresi yang lebih tinggi dan tingkat kesejahteraan subjektif yang lebih rendah dibandingkan masyarakat miskin perdesaan.
- c. Masyarakat miskin cenderung memiliki tingkat diskonto waktu yang tinggi.
- d. Tingkat diskonto waktu yang tinggi disebabkan oleh tingkat refleksi kognitif yang rendah.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah tertulis, pembatasan masalah pada penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh refleksi kognitif terhadap diskonto waktu pada masyarakat miskin perkotaan di Jakarta.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh refleksi kognitif terhadap diskonto waktu pada masyarakat miskin perkotaan di Jakarta?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh refleksi kognitif terhadap diskonto waktu pada masyarakat miskin perkotaan di Jakarta.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memperluas pemahaman, serta memberikan kontribusi ilmiah, khususnya dalam bidang psikologi sosial.

1.6.2 Manfaat Praktis

Berikut adalah manfaat praktis yang diharapkan bisa didapat dari dilakukannya penelitian ini:

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang hendak meneliti terkait dengan diskonto waktu dan refleksi kognitif.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan masyarakat terkait lingkaran kemiskinan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mengasah kemampuan refleksi kognitif, yang memungkinkan mereka untuk menganalisis informasi secara lebih mendalam sebelum mengambil keputusan.